



*DJKN*

2024

LAPORAN KINERJA  
**KPKNL  
PALEMBANG**

## DAFTAR ISI

<b>PENGANTAR</b> .....	3
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	4
<b>BAB I</b> .....	7
<b>PENDAHULUAN</b> .....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	7
C. Isu Strategis.....	10
<b>BAB II</b> .....	13
<b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
C. Pengukuran Kinerja.....	19
<b>BAB III</b> .....	23
<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	23
A. Capaian Kinerja KPKNL Palembang.....	23
B. Realisasi Anggaran.....	34
<b>BAB IV</b> .....	36
<b>PENUTUP</b> .....	36
<b>LAMPIRAN</b> .....	38

## PENGANTAR

Yang kami hormati Bapak Kepala Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung (SJB), bersama ini kami sajikan Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2024. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja KPKNL Palembang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024.

Dari hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Palembang adalah 115,33% nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada *Stakeholder Perspective* sebesar 33,55%, *Customer Perfective* sebesar 23,65%, *Internal Process Perspective* sebesar 29,00%, *Learning and Growth Perspective* sebesar 29,13%, Selanjutnya, 11 Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan 20 IKU memenuhi target yang ditetapkan. Pencapaian target tersebut tentunya tidak lepas dari koordinasi dan dukungan yang baik dengan semua *stakeholders*. KPKNL Palembang menyambut positif hasil pencapaian ini dan akan terus berupaya meningkatkan pelayanan prima kepada semua *stakeholders* agar kinerja organisasi dapat semakin meningkat.

Semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta pendorong peningkatan kinerja organisasi DJKN.

Kepala KPKNL Palembang



Ditandatangani secara elektronik

Mardhanus Rudiyanto



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2024 adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Palembang selama tahun 2024 yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada KPKNL Palembang atas penggunaan anggaran. Dalam menyusun laporan kinerja KPKNL Palembang menggunakan data pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja KPKNL Palembang selama tahun 2024.

Visi DJKN adalah Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat. Dalam mencapai visi tersebut KPKNL Palembang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Untuk mewujudkan visi tersebut, KPKNL Palembang mempunyai enam misi yaitu (1) Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran, dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara; (2) Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum; (3) Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah; (4) Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; (5) Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; (6) Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam mencapai visi dan misi, KPKNL Palembang menetapkan tujuan strategis yang harus dicapai selama tahun 2020-2024 yaitu Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial, Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya, Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien, Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah Peta Strategi DJKN Tahun 2020 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari 4 perspektif yaitu *stakeholder/customer*, *internal process*, dan *learning and growth*. Peta strategi terkait dengan KPKNL Palembang terdiri dari 4 (empat) Peta Strategi yaitu *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal process Perspective* dan *Learning & Growth Perspective* dan sembilan sasaran strategis yaitu (1) Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang Akuntabel Inklusif dan Berkelanjutan; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa; (3)

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (4) Pelaksanaan Penilaian yang akuntabel dan profesional; (5) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Lelang yang efektif; (6) Pengawasan dan pengendalian Kekayaan Negara yang efektif; (7) Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal; (8) Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang efektif; (9) Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas IKU didasarkan pada kriteria SMART-C (*Specific, Measureable, Agreeable, Realistic, Time-bounded* dan *Continuously Improved*). Pada tahun 2024 dihasilkan 20 IKU yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kanwil DJKN SJB dengan Kepala KPKNL Palembang.

Secara umum pencapaian IKU pada tahun 2024 sangat memuaskan yaitu dari total 9 IKU, 20 IKU semua berstatus hijau dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,33%.

Implementasi manajemen kinerja *balanced scorecard* di DJKN telah berjalan dengan baik walaupun masih membutuhkan beberapa penyempurnaan. Segala upaya perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi lebih baik lagi. Untuk itu, KPKNL Palembang akan senantiasa berupaya dan bekerja lebih keras lagi, sehingga kualitas KPKNL Palembang sebagai organisasi berkinerja tinggi (*high performance organization*) semakin meningkat.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas yang sangat strategis yaitu, merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPKNL Palembang merupakan unit eselon III (tiga) di lingkungan DJKN yang berada di wilayah kerja Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No 4 Gedung Keuangan Negara Lt. 1-2 Blok C Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. KPKNL Palembang memiliki wilayah kerja yang tersebar di 2 (dua) kota dan 7 kabupaten yaitu Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sebagai wujud penjabaran dari visi yang telah ditetapkan, KPKNL Palembang memiliki 6 (enam) misi yang harus diemban dan dilaksanakan, yaitu :

- a. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara.
- b. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum.
- c. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
- d. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian.
- e. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- f. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Palembang memiliki tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang dengan fungsi yang meliputi:

- a. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- e. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f. Pelaksanaan pelayanan lelang;

- g. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
- h. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- i. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
- j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

KPKNL Palembang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang membawahi 5 unit eselon IV dan pejabat fungsional yang terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Jabatan Fungsional

Gambar 1  
Struktur Organisasi KPKNL Palembang



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPKNL Palembang didukung oleh para pegawai dari berbagai bidang keahlian antara lain keuangan, hukum, ekonomi dsb. Adapun komposisi pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan, golongan, umur dan jumlah tenaga fungsional adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

	PENDIDIKAN					JUMLAH PEGAWAI
	S2	S1/DIV	D3	D1	SMU	
KPKNL Palembang	7	17	6	1	2	33

Sumber : Data HRIS per Desember 2024

Tabel 2  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	JUMLAH
II	3
III	24
IV	6
JUMLAH	33

Sumber : Data HRIS per Desember 2024

Tabel 3  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Pelelang	6
2	Penilai Pemerintah	4
3	Pranata Keuangan	1
TOTAL		11

Sumber : Data HRIS per Desember 2024

### C. Isu Strategis

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang, KPKNL Palembang memiliki peran strategis dan permasalahan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Amanat konstitusi tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta mengamankan sumber daya alam strategis untuk dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Perubahan paradigma pengelolaan kekayaan negara dari *asset administration* (penatausahaan aset) menjadi *asset manager* (manajer aset) menuntut peran dan tanggung jawab yang lebih besar dari pengelola barang untuk mengelola kekayaan negara lebih optimal dan akuntabel.
3. Optimalisasi pemanfaatan aset potensial dalam rangka peningkatan utilisasi aset, peningkatan penerimaan negara, dan mewujudkan APBN yang efektif, efisien, dan optimal.
4. Komitmen DJKN dalam mencapai misi bahwa pengelolaan kekayaan negara dapat menjadi salah satu proses bisnis di Kementerian Keuangan.
5. Hasil revaluasi BMN tahun 2018-2019 dijadikan dasar untuk mengukur nilai BMN secara *up to date* dalam skala nasional di Indonesia.
6. Pengembangan teknologi di dalam organisasi untuk menciptakan suatu yang lebih praktis dan efisien khususnya dalam upaya pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang.
7. KPKNL Palembang memberikan kontribusi berupa penerimaan negara bukan pajak (PNPBP) yang berasal dari pengurusan piutang negara dan lelang.
8. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

#### D. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif  
Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya.
2. Bab I Pendahuluan  
Menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi dan struktur organisasi, peran strategis organisasi, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.
3. Bab II Perencanaan Kinerja  
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2024.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja  
Menguraikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran Tahun 2024.
5. Bab IV Penutup  
Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2020-2024, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan jangka menengah, dokumen ini juga menunjukkan peran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Palembang pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi Manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Palembang telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra KPKNL Palembang, terdapat sembilan sasaran, yaitu sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan adalah:
  - a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang; dan
  - b. Indeks Integritas.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa adalah:
  - a. Tingkat Kesesuaian Pengguna BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan; dan
  - b. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal adalah:
  - a. Persentase Realisasi Pokok Lelang; dan
  - b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017).
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien adalah Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif adalah:
  - a. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan;
  - b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (portofolio aset); dan
  - c. Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN *Idle*.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif adalah:
  - a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara; dan
  - b. Persentase Produktifitas Lelang.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Persentase Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian.
8. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif adalah:
  - a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai; dan

- b. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko.
- 9. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel adalah:
  - a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran; dan
  - b. Deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN.
- 10. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Komunikasi Publik yang Efektif adalah Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID).
- 11. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah adalah:
  - a. Indeks Efektivitas UKI; dan
  - b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Palembang. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Palembang yang akan ditempuh adalah:

1. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan adalah:
  - a. Menjalankan kebijakan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan penuh integritas dan secara akuntabel.
  - b. Mendukung transformasi ekonomi yang digaungkan Kementerian Keuangan untuk mewujudkan suatu kondisi perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan.
2. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa adalah:
  - a. Memenuhi harapan pengguna jasa dalam upaya untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa.
  - b. Ketetapan penyampaiannya bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa.
  - c. Memenuhi standar kualitas layanan kekayaan negara yang tinggi.
3. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan piutang dan lelang yang optimal adalah:
  - a. Memastikan pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa.
  - b. Ketetapan penyampaiannya bahwa pengelolaan kekayaan negara dilakukan dengan baik, sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna jasa.

4. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan layanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien adalah memberikan kepastian kepada customer atas pelayanan penilaian.
5. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif adalah:
  - a. Pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat.
  - b. Pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur.
  - c. Melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
6. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif adalah:
  - a. Penyelesaian secara optimal dalam saldo berkas piutang negara.
  - b. Pelaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara.
7. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan persentase penilaian yang akuntabel dan profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian.
8. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan organisasi dan sdm yang adaptif adalah:
  - a. Mewujudkan implementasi kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
  - b. Memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis.
9. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah:
  - a. Memastikan pelaksanaan anggaran secara optimal.
  - b. Penghitungan deviasi data PNBPN Fungsional DJKN secara akurat.
10. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan komunikasi publik yang efektif adalah Meningkatkan efektivitas penyediaan layanan data/informasi bagi masyarakat umum mengenai Kemenkeu.
11. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah adalah:
  - a. Meningkatkan berbagai bentuk layanan Pengawasan yang bernilai tambah.
  - b. Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Itjen secara optimal.

#### B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024

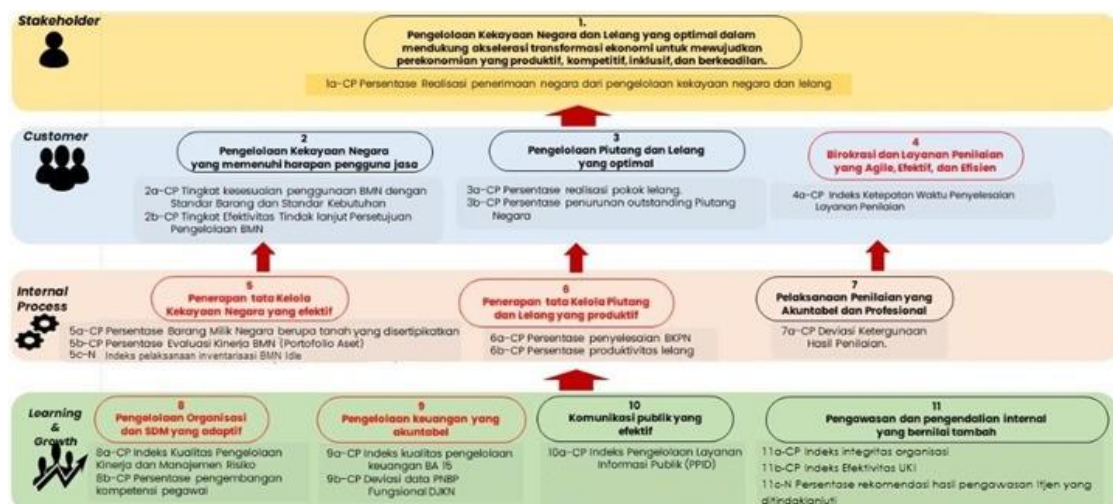
Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis KPKNL Palembang. Sasaran Strategis KPKNL Palembang Tahun 2024 telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi KPKNL Palembang. Peta Strategi KPKNL Palembang Tahun 2024 memuat sebelas sasaran strategis yaitu (1) pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan; (2) pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa; (3) pengelolaan piutang dan lelang yang optimal; (4) ayanan penilaian yang agile, efektif, dan efisien; (5) penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif; (6) penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif; (7) persentase penilaian yang akuntabel dan profesional; (8) mewujudkan pegelolaan organisasi dan sdm yang adaptif; (9) pengelolaan keuangan yang akuntabel; (10) komunikasi publik yang efektif; dan (11) pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah.

Gambar 2

Peta Strategi pada Kontrak Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2024



Peta Strategi DJKN menerapkan 4 perspektif, yaitu: *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh

organisasi agar dinilai berhasil oleh *stakeholder*. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari *customer* dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.

Dari Peta Strategi DJKN Tahun 2024 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh KPKNL Palembang terdapat 11 sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel 5 berikut:

Tabel 4  
Sasaran Strategis KPKNL Palembang

Kode	Sasaran Strategis	V/C	Target	Realisasi
<b>Stakeholder Perspective (30%)</b>				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	121,12%
1b-CP	Indeks Integritas	P/M	89,17	92,44
<b>Customer Perspective (20%)</b>				
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	P/M	71,50%	83,91%
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	P/M	86,5%	97,02%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal			
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	130,31%
3b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	169,79%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75	101,67
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>				
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif			
5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipkatkan	P/L	100%	103,99%
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/L	100%	120,09%

5c-CP	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	P/M	100	100
6	Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif			
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	P/M	80%	59%
6b-CP	Persentase produktifitas lelang	P/M	89%	114,94%
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan Pprofesional			
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16,0%	0,70%
Learning & Growth Perspective (25%)				
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90%	106,97%
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	85	96,22
9	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	120
9b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	P/M	10%	0,00%
10	Komunikasi publik yang efektif			
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan informasi Publik (PPID)	P/M	80	100
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah			
11a-N	Indeks efektivitas UKI		82	97
11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti		98%	100%

### C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, KPKNL Palembang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%.
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya.
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU.
4. IKU yang ditetapkan diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target.
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%.
- b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari tiga (3) jenis, yaitu:

1. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Maximize Indeks Capaian = Realisasi/Target x 100%*

IKU yang memiliki polarisasi *maximize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

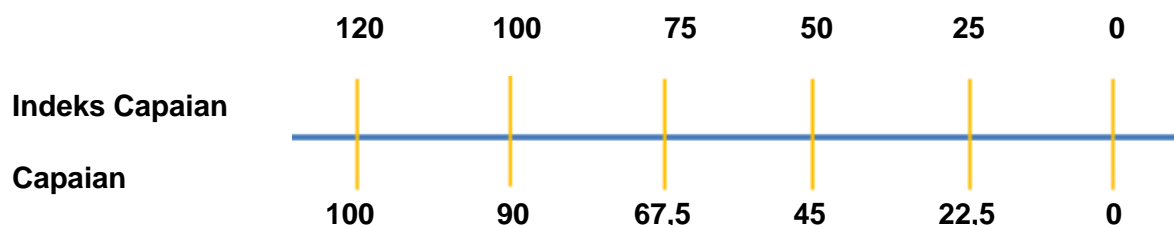
2. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Minimize Indeks Capaian = [1 + (1 - Realisasi/Target)] X 100%*

IKU yang memiliki polarisasi *minimize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja *lebih kecil* dari nilai target yang ditetapkan.

3. Perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki polarisasi *Stabilize*

$$I = I_n + \frac{I_{n+1} - I_n}{C_{n+1} - C_n} (C - C_n)$$

Dengan grafik sebagai berikut:



- $I_n$  = Indeks capaian
- $I_{n-1}$  = Indeks capaian dibawahnya
- $I_{n+1}$  = Indeks capaian diatasnya
- $C_a$  = Capaian awal
- $C_n$  = Realisasi/target x 100%

$C_n$  = Capaian dengan ketentuan :

- a. Apabila Realisasi > Target, maka:  
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$ , dimana  $C_a$  maksimum adalah 200%
- b. Apabila Realisasi < Target, maka :  $C_n = C_a$   
 $C_{n-1}$  =Capaian dibawahnya  
 $C_{n+1}$  = Capaian diatasnya

IKU yang memiliki polarisasi *stabilize*, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja diharapkan berada dalam suatu rentang target tertentu. Apabila hasil perhitungan nilai capaian IKU melampaui target, akan menghasilkan nilai maksimal 120%. Karena IKU *stabilize* mengharapkan capaian dalam rentang tertentu di sekitar target, maka capaian yang dianggap paling baik adalah capaian yang tepat sesuai dengan target.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Capaian Kinerja KPKNL Palembang

Sebagaimana diketahui, pada Tahun 2024 KPKNL Palembang telah menetapkan 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan dibawah ini:

Tabel 5  
Capaian IKU 2024

Kode	IKU	Target	Realisasi	Indeks Max. 120%
	<b>Stakeholder Perspective(30%)</b>			<b>33,55%</b>
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan			111,83%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	121,12%	120,00%
1b-CP	Indeks Integritas	89,17	92,44	103,67%
	<b>Customer Perspective (20%)</b>			<b>23,65%</b>
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa			114,76%
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	71,50%	83,91%	117,35%
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	86,5%	97,02%	112,16%
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal			120,00%
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	130,31%	120,00%
3b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100%	169,79%	120,00%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien			120,00%
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	75	101,67	120,00%
	<b>Internal Process Perspective (25%)</b>			<b>29,00%</b>
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif			108,00%
5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	103,99%	103,99%
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100%	120,09%	120,00%

5c-CP	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	100	100	100,00%
6	Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif			120,00%
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	80%	59%	120,00%
6b-CP	Persentase produktifitas lelang	89%	114,94%	120,00%
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan Profesional			120,00%
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	16,0%	0,70%	120,00%
	<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>			<b>29,13%</b>
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			116,03%
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	106,97%	118,86%
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	85	96,22	113,20%
9	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			120,00%
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120	120,00%
9b-N	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	10%	0,00%	120,00%
10	Komunikasi publik yang efektif			120,00%
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan informasi Publik (PPID)	80	100	120,00%
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah			109,98%
11a-N	Indeks efektivitas UKI	82	97	117,93%
11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%	100%	102,04%

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Palembang Tahun 2024 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kemenkeu *Three* KPKNL Palembang sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama

- a. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara adalah PNBPN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diluar penerimaan perpajakan, yang bersumber dari barang milik negara dan hasil pengurusan piutang negara.

Capaian IKU (Target/Realisasi nominal PNBPN Aset, PN dan Lelang) = 121,15% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6  
 Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara  
 dan Lelang

Uraian	2024		
	Pengelolaan BMN	Piutang Negara	Lelang
Target	22,000,000,000	12,610,000	21,055,678,105
Realisasi	33,228,461,548	20,741,115	18,817,228,850
Capaian	151,49%	164,48%	89,37%
Capaian Kinerja Total	121,125%		
Nilai Kinerja	120,00%		

b. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Tabel 7  
 Indeks Integritas

Uraian	2024
	Indeks Integritas
Target Q4	89,17
Realisasi Q4	92,44
Capaian	103,67%
Nilai Kinerja	103,67%

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

Responden terdiri dari :

- 1) Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel;
- 2) Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:

- 1) Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain;
- 2) Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I;

- 3) Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi;
- 4) Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode;
- 5) Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara *random/acak* dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

a. Internal

- 1) Perdagangan Pengaruh;
- 2) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
- 3) Pengelolaan SDM;
- 4) Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
- 5) Sosialisasi Antikorupsi; dan
- 6) Transparansi

b. Eksternal

- 1) Upaya Pencegahan Korupsi;
- 2) Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
- 3) Integritas Pegawai.

2. Sasaran Strategis Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama

a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

Penggunaan Barang Milik Negara yang sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara atas pengelolaan Aset Negara termasuk *existing* luasan BMN satker yang sedang dimanfaatkan dengan persetujuan Pengelola Barang.

Capaian IKU (Target/Realisasi nominal BMN pada satker) = 117,35% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8  
Persentase Pengukuran Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

	2023	2024
Target	68%	71,50%
Realisasi	71,02%	83,91%
Capaian	104,43%	117,35%
Nilai Kinerja	104,43%	117,35%

b. Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

Perhitungan Capaian IKU berdasarkan kertas kerja IKU Persentase Tindak Lanjut Pengelolaan BMN dan/atau dokumen dukung tindak lanjut yang direkam pada aplikasi SIMAN.

Capaian IKU (Jumlah Tindak Lanjut Persetujuan/Penolakan Penetapan Pengelolaan BMN /Jumlah Persetujuan /Penetapan Pengelolaan BMN yang Diterbitkan) = 97,02% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9

Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN

	2023	2024
Target	86%	86,5%
Realisasi	94%	97,02%
Capaian	109,3%	112,16%
Nilai Kinerja	109,3%	112,16%

3. Sasaran Strategis Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama

a. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan, dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/ JF Pelelang), dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optim *Evaluasi Kinerja*. Pelaksanaan lelang yang optimal dapat teridentifikasi dari hasil lelang yang kompetitif dengan terjualnya barang yang dilelang minimal sesuai dengan harga dasar/limit lelang dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.

Pada tahun 2024, terdapat IKU Persentase hasil Lelang yang diperoleh dari Persentase realisasi jumlah pokok lelang kelas I + Pegadaian terhadap target. Hal tersebut merupakan komponen dalam menghitung capaian IKU Persentase hasil lelang. Untuk tahun 2024 sendiri, capaian sebesar 130,31% didapat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10

Realisasi Pokok Lelang

	Pokok Lelang 2024	
	Target	Realisasi
PL Kls I	306.254.192.987,64	415.298.520.792

Pegadaian	110.000.000.000.,00	126.951.833.600
-----------	---------------------	-----------------

Tabel 11  
Persentase Hasil Lelang (Pokok Lelang)

	2023	2024
Target	388.700.000.000	416.254.192.988
Realisasi	560.547.003.483	542.250.354.392
Capaian	144,21%	130,31%
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%

- b. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara  
 IKU Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2017 atau sebelumnya, pada akhir tahun (31 Desember 2024) Meliputi:  
 Capaian IKU (Target/Realisasi nominal Penurunan outstanding piutang Negara) = 169,79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12  
Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara

	2023	2024
Target	2.004.000.000	2.381.000.000
Realisasi	2.541.060.138	4.042.992.362
Capaian	126,80%	169,80%
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%

4. Sasaran Strategis Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian  
 Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup penilaian adalah; Penilaian BMN berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian. Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon. Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.  
 Capaian IKU (Indeks Pelaksanaan Penilaian per Laporan Penilaian/Jumlah Laporan Penilaian) = 135,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13  
Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

	2024
Target	75
Realisasi	101,67
Capaian	135,56%
Nilai Kinerja	120,00%

5. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama

a. Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan

Perbandingan antara realisasi kinerja persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan serta capaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 14  
Persentase Bidang Tanah BMN yang Disertifikatkan

	2023	2024
Target	1935	1254
Realisasi	2350	2424
Capaian	116,69%	103,99%
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%

b. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Capaian persentase evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) tahun 2024 adalah 120,09% (nilai kinerja 120,00%) dengan jumlah realisasi sebanyak 218.

c. Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN *Idle*

Inventarisasi dilakukan terhadap seluruh BMN eks BMN Idle yang tercatat pada Daftar Barang Pengelola. Inventarisasi dilaksanakan dengan mendaftarkan satu per satu BMN eks BMN idle yang dicatat dalam Daftar Barang Pengelola sekaligus melakukan pengkinian data terhadap identitas dan kondisi BMN terkini atau termuktahir, baik yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang maupun dalam hal terdapat penguasaan pihak lain sehingga mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan BMN eks BMN Idle yang akuntabel. Pada tahun 2024, KPKNL Palembang memiliki capaian realisasi sebesar 100% (nilai kinerja 120,00%).

6. Sasaran Strategis Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama

a. Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

Tahapan pengurusan piutang negara dimulai sejak diterimanya penyerahan piutang negara sampai dengan piutang negara dinyatakan lunas atau selesai. Pengurusan piutang negara dikatakan optimal apabila dapat menyelesaikan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang masih diurus oleh KPKNL, berhasil melakukan penagihan piutang negara, dan memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun terakhir untuk KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

Tabel 15  
Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara

	2023	2024
Target	45	109
Realisasi	55	47
Capaian	110,00%	127%
Nilai Kinerja	110,00%	120,00%

b. Persentase Produktifitas Lelang

Mengukur tingkat produktivitas lelang dinilai dari persentase lot lelang laku lelang yang laku per jenis lelang dengan jumlah frekuensi lelang yang ditargetkan. Pada tahun 2024, KPKNL Palembang mencapai realisasi 129,15% (nilai kinerja 120,00%) dari target sebesar 89%.

7. Sasaran Strategis Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional dengan IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

Deviasi ketergunaan hasil penilaian meliputi Capaian IKU (Target/Realisasi jumlah deviasi ketergunaan hasil penilaian) sebesar 195,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16  
Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

	2023	2024
Target	25%	16%
Realisasi	1,25%	0,70%
Capaian	195,02%	195,63%
Nilai Kinerja	120,00%	120,00%

8. Sasaran Strategis Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama

a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Mengukur upaya dalam mengembangkan SDM melalui alokasi waktu kerja yang digunakan untuk mengikuti pelatihan dan juga kesesuaian pelaksanaan dengan

perencanaan pengembangan pegawai, dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 17  
Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

Uraian	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Kinerja
Kegiatan Kebintalan	100%	101%	118,86%	118,86%
Kompetensi Pegawai	100%	120%		

b. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko

IKU ini untuk mengetahui seberapa perkembangan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJKN serta untuk menghasilkan umpan balik yang positif bagi perbaikan kualitas pengelolaan kinerja di masa mendatang. Pada tahun 2024, capaian IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko KPKNL Palembang mencapai 113,20% (nilai kinerja 113,20%) dengan rincian capaian 96,22 dengan target 85.

9. Sasaran Strategis Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama

a. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Capaian kinerja terkait Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Palembang tahun 2024 120% (nilai kinerja 120%) dari target 100 dengan realisasi 120. Pengukuran mengikuti SE-35/MK.1/2017 tentang Tata Cara Pengukuran IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan KPKNL Palembang. Penyebab keberhasilan kinerja antara lain :

- a. Sinergi yang baik antara KPKNL Palembang dan *stakeholders* sehingga target dapat tercapai.
- b. Kerjasama (*teamwork*) internal yang solid untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di KPKNL Palembang.
- c. Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, *sharing knowledge* agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.

Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan, kegiatan pembinaan yang dilakukan secara internal meliputi:

- a. *Sharing knowledge* melalui rapat pembinaan, diskusi, sosialisasi internal terhadap peraturan baru.
- b. Mendorong pegawai untuk lebih kreatif dan berinovasi guna memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi kantor serta pelayanan kepada *stakeholder*.

b. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

Target Deviasi PNBP dari Bea Lelang adalah 10%, sedangkan Target Deviasi PNBP dari Biad PPN adalah 10%, sehingga rata-rata target 10%. IKU ini bertujuan dalam rangka akurasi penyajian Data PNBP DJKN. Pada tahun 2024, KPKNL Palembang memiliki capaian deviasi data PNBP sebesar 200,00% yaitu 0,00% (nilai kinerja 120,00%).

10. Sasaran Strategis Komunikasi Publik yang Efektif dengan Indikator Kinerja Utama Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Selain penyampaian informasi publik, pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) bertanggung jawab dalam menyampaikan laporan pengelolaan informasi publik yang disampaikan kepada pelaksana PPID di atasnya sesuai dengan norma waktu yang diatur dalam PMK Nomor 110 Tahun 2022 serta pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) wajib menyediakan, mengumumkan dan memutakhirkan Informasi Publik Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta dan Informasi Publik Tersedia Setiap Saat secara berkala pada masing-masing website untuk menjaga agar Informasi Publik tetap akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Adapun capaian kinerja KPKNL Palembang terkait Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) tahun 2024 mencapai 125% (nilai kinerja 120,00%) dari target 80 dan realisasi capaian sebesar 100.

11. Sasaran Strategis Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama

a. Indeks Efektivitas UKI

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen yaitu Komponen Pengungkit (Bobot 25%), Komponen Proses (25%), dan Komponen Hasil (Bobot 50%). Pada tahun 2024, KPKNL Palembang memiliki IKU Indeks

Efektivitas UKI dengan capaian realisasi 117,93% (nilai kinerja 117,93%) dengan target 82 dan capaian sebesar 97.

- b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen yang Ditindaklanjuti  
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa Rekomendasi *Policy Recommendation*, Rekomendasi Hukuman Disiplin, dan Rekomendasi Hasil Pengawasan selain *Policy Recommendation*. Pada tahun 2024, KPKNL Palembang memiliki target sebesar 98% dengan capaian sebesar 102,04% (nilai kinerja 120,00%).

## B. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai seluruh kegiatan KPKNL Palembang pada tahun 2024, telah dialokasikan DIPA (setelah direvisi) sebesar Rp 2.622.732.000. Dilihat dari nilai capaian program pelaksanaan penggunaan DIPA, secara umum KPKNL Palembang tidak mengalami kesulitan dalam masalah pembiayaan kegiatan kantor.

Tabel 18  
Penyerapan Anggaran KPKNL Palembang Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi s.d 31 Des 2024	
		(Rp)	%
Belanja Modal	81.027.000	80.619.517	99,50%
Belanja Barang	2.541.705.000	2.279.989.447	89,70%
<b>Jumlah</b>	<b>2.622.732.000</b>	<b>2.360.608.964</b>	<b>90,01%</b>



## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja KPKNL Palembang Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi Kementerian Keuangan serta visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024 yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020- 2024.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Palembang pada tahun 2024 secara umum dapat dikatakan baik karena 20 (dua puluh) IKU KPKNL Palembang berwarna hijau dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,33%.

Dalam rangka mengamankan sasaran dan tujuan diperlukan strategi untuk menghadapi berbagai kendala yang ada, strategi yang diterapkan oleh KPKNL Palembang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dan kolaborasi yang sinergis antara KPKNL dan para pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah sehingga target dapat tercapai.
2. Melakukan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi di KPKNL Palembang.
3. Selalu menjaga kualitas layanan sesuai dengan janji layanan KPKNL Palembang.
4. Meningkatkan motivasi SDM melalui kegiatan diklat, sosialisasi, *sharing knowledge* agar pegawai tetap memiliki integritas dan profesionalisme dalam bekerja.
5. Terkait Pengelolaan Kekayaan Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
  - a. koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara KPKNL dengan para pemangku kepentingan;
  - b. peningkatan *self awarness* Satuan Kerja terkait dengan optimalisasi Barang Milik Negara, termasuk dalam peningkatan PNBPN dari pengelolaan BMN.
6. Terkait pelayanan Penilaian kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
  - a. Penilaian dilakukan sesuai prosedur dengan didukung data dan fakta yang akurat baik itu data objek penilaian maupun data objek pembandingan; dan
  - b. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh seorang penilai pemerintah atau tim dimana jumlah hari pelaksanaan dilakukan seefisien mungkin dengan mempertimbangkan kompleksitas objek penilaian dan jumlah objek penilaian.
7. Terkait Pengurusan Piutang Negara kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:

- a. melakukan pendekatan secara persuasif kepada debitur/Penanggung Hutang agar tetap melunasi/mengangsur hutangnya;
  - b. melakukan penggalian potensi piutang negara/daerah terus ditingkatkan kepada penyerah piutang; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan pihak BPN untuk mengetahui letak barang jaminan khususnya tanah dan bangunan, meminta pendampingan Penyerah Piutang dalam pelaksanaan Penyitaan.
8. Terkait Lelang kami melakukan langkah-langkah strategis meliputi:
- a. Melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk lelang BMD; dan
  - b. Melakukan koordinasi dengan pemohon lelang terkait pelaksanaan lelang ulang untuk objek lelang yang *represtatif* dan *marketable*.
9. Selalu berupaya untuk Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Segala yang dicapai saat ini merupakan hasil kerjasama semua pegawai KPKNL Palembang, dimana hal ini harus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Suatu tujuan tidak akan tercapai apabila tidak ada komitmen dan konsistensi yang telah direncanakan bersama. Dalam upaya menjaga komitmen dan konsisten maka dibutuhkan kerjasama dan kebersamaan seluruh jajaran di lingkungan KPKNL Palembang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Palembang ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan baik kepada instansi vertikal di atasnya maupun semua jajaran di lingkungan KPKNL Palembang. Akhir kata “Tiada gading yang tak retak”, KPKNL Palembang dengan kerendahan hati menerima saran/masukan yang konstruktif untuk perbaikan menuju tercapainya visi dan misi DJKN tercinta.

# LAMPIRAN

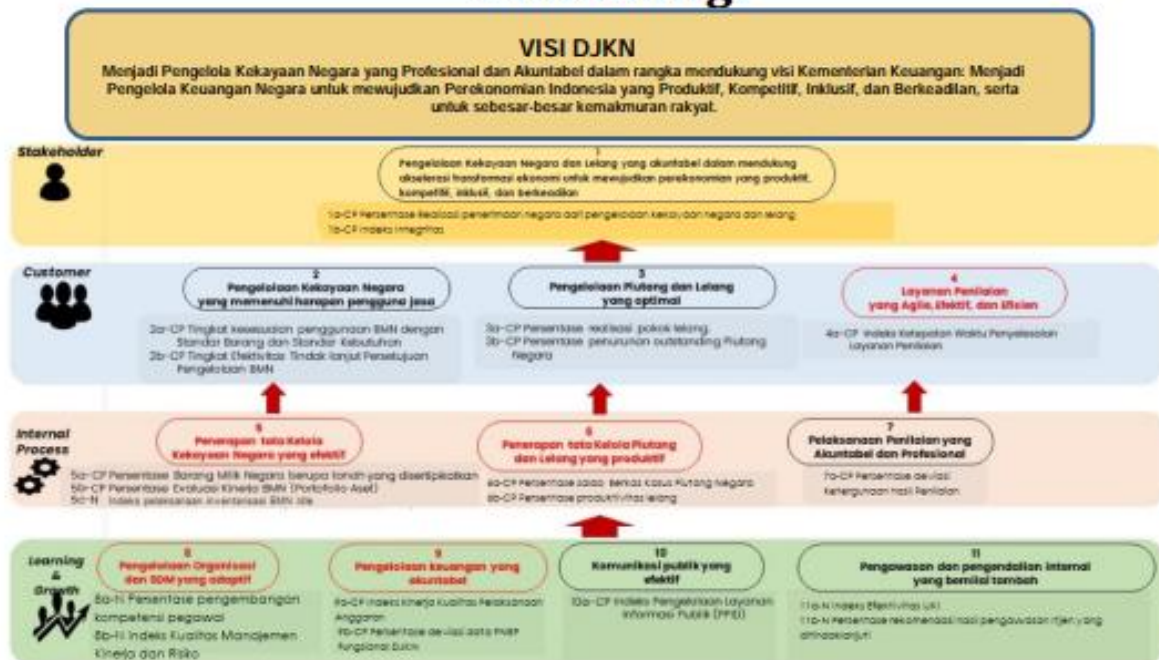
## Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Palembang Tahun 2024

Kode	KU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Bobot Asal	Bobot Akhir KU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Keterangan
<b>Stakeholder Perspective (10%)</b>								<b>33,55%</b>	
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							111,81%	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	121,12%	14%	50%	121,125%	120,00%	hijau
1b-CP	Indeks Integritas	P/M	89,17	92,44	14%	50%	103,67%	103,67%	hijau
<b>Customer Perspective (20%)</b>								<b>23,65%</b>	
2	Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							114,76%	
2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan	P/L	71,50%	83,91%	19%	50%	117,35%	117,35%	hijau
2b-CP	Tingkat efektivitas tindak lanjut persetujuan pengelolaan barang milik negara	P/L	86,5%	97,02%	19%	50%	112,16%	112,16%	hijau
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							120,00%	
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	130,31%	14%	50%	130,31%	120,00%	hijau
3b-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PMS s.d 2017)	P/M	100%	169,79%	14%	50%	169,79%	120,00%	hijau
4	Layanan Penilaian yang Agil, Efektif, dan Efisien							120,00%	
4a-CP	Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan penilaian	P/M	75	101,67	14%	100%	115,56%	120,00%	hijau
<b>Internal Process Perspective (25%)</b>								<b>29,00%</b>	
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							106,00%	
5a-CP	Persentase barang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	101,99%	14%	33%	101,99%	103,99%	hijau
5b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	P/M	100%	120,09%	14%	33%	120,09%	120,00%	hijau
5c-CP	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	P/M	100,00	100	14%	33%	100,00%	100,00%	hijau
6	Penerapan tata kelola piutang dan lelang yang produktif							120,00%	
6a-CP	Persentase saldo berkas kasus piutang negara	P/M	80%	59%	14%	50%	127%	120,00%	hijau
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	89%	114,94%	14%	50%	129,15%	120,00%	hijau
7	Pelaksanaan penilaian yang akuntabel dan Profesional							120,00%	
7a-CP	Persentase deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	16,0%	0,70%	14%	100%	195,63%	120,00%	hijau
<b>Learning &amp; Growth Perspective (25%)</b>								<b>29,13%</b>	
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							116,03%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	90%	106,97%	14%	50%	118,86%	118,86%	hijau
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	P/M	85	96,22	14%	50%	113,20%	113,20%	hijau
9	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							120,00%	
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	100	120,00	14%	50%	120,00%	120,00%	hijau
9b-N	Deviasi Data PNBP Fungsional DIKN	P/M	10%	0,00%	14%	50%	200,00%	120,00%	hijau
10	Komunikasi publik yang efektif							120,00%	
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	P/M	80	100,00	14%	100%	125,00%	120,00%	hijau
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							100,98%	
11a-N	Indeks efektivitas UN	P/M	82	97	14%	50%	117,93%	117,93%	hijau
11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan ljen yang ditindaklanjuti	P/M	98%	100,00%	14%	50%	102,04%	102,04%	hijau
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>								<b>115,33%</b>	hijau



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR : PK-02 /WKN.04/2024**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN**  
**NEGARA DAN LELANG PALEMBANG**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

## Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk menjadikan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP Persentase Realisasi Penertimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (Rp43,06 M)
		1b-CP Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
		2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	3a-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp416,25 M)
		3b-CP Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100% (Rp2,33 M)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
		5c-N Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	6a-CP Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	82% (94 BKN)
		6b-CP Persentase produktivitas lelang	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%
		8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85
9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP Persentase deviasi data PNBP Fungsional DKN	10
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-N Indeks efektivitas UKI	82
		11b-N Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98

Program/Kegiatan Tahun 2024

<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	Rp	<b>901.482.000</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp	14.940.000
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	Rp	0
3. Pengelolaan Aset	Rp	886.542.000
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	Rp	0
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	Rp	0
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	Rp	0
<b>Dukungan Manajemen</b>	Rp	<b>1.604.052.000</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp	26.076.000
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	1.528.364.000
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp	26.668.000
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp	22.944.000
5. Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	Rp	0

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara  
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung



Ditandatangani Secara Elektronik  
Ferdinan Lengkong

Jakarta, 30 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan  
Lelang Palembang



Ditandatangani Secara Elektronik  
Mardhanus Rudiyanto

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	-	-	-	-	-	89,17	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%
2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	45	45	-	86,5	86,5	86,5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal							
3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
5	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif							
5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10%	32%	32%	80%	80%	100%	100%
5c-N	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN	25%	55%	55%	70%	70%	100%	100%
6	Penerapan Tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif							
6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96%	90%	90%	87%	87%	82%	82%
6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	45%	45%	60%	60%	89%	89%
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
7a-CP	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	16%	16%	16%	16%	16%	16%
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
8a-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	90%	90%
8b-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85

9	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
9b-CP	Persentase deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
10	Komunikasi public yang efektif							
10a-N	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
11	Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah							
11a-N	Indeks Efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
11b-N	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%

**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Kompetisi Inovasi Manajer Aset (KOIN MAS) DJKN	Jumlah aset yang diberdayakan dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada masyarakat	Q1: Inventarisasi terhadap aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Daftar Aset yang akan diberdayakan/dimanfaatkan	Q1 s.d. Q4	Seksi PKN	-
				Q2: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q2: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q3: Pelaksanaan Monitoring Kegiatan	Q3: Laporan Kegiatan Monitoring			
				Q4: Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Q4: Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan			

**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN  
KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun  
2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Mardhanus Rudiyanto	NAMA	Ferdinan Lengkong	
NIP	197403161998031001	NIP	196612121991031001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya, IV/d	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima layanan
		Indeks Integritas	89,17	Penerima layanan
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	Penerima layanan
		Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86,5	Penerima layanan
3.	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang Optimal	Persentase realisasi pokok lelang	100%	Penerima layanan
		Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	Penerima layanan
4.	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	Penerima layanan
5.	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses bisnis
		Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses bisnis
		Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	100	Proses bisnis
6.	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang Produktif	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	82%	Proses bisnis
		Persentase produktivitas lelang	89%	Proses bisnis

7.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	Proses bisnis
8.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90%	Pembelajaran dan pertumbuhan
		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	Pembelajaran dan pertumbuhan
9.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Pembelajaran dan pertumbuhan
		Persentase deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10%	Pembelajaran dan pertumbuhan
1.	Komunikasi publik yang efektif	Indeks Pengelolaan Layanan informasi Publik (PPID)	80	Pembelajaran dan pertumbuhan
11.	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	Indeks efektivitas UKI	82	Pembelajaran dan pertumbuhan
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	98%	Pembelajaran dan pertumbuhan

#### B. TAMBAHAN

--	--	--	--	--

#### PERILAKU KERJA

1	<p>Berorientasi pelayanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li> <li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	<p>Akuntabel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li> <li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li> <li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	<p>Kompeten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li> <li>- Membantu orang lain belajar</li> <li>- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	<p>Harmonis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya</li> <li>- Suka menolong orang lain</li> <li>- Membangun lingkungan kerja yang kondusif</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	<p>Loyal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi</p>

PERILAKU KERJA		
	- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	dan negara.
6	<b>Adaptif</b> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	<b>Kolaboratif</b> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	36 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	<b>No</b>	<b>IKI</b>	<b>Target</b>						
			<b>Q1</b>	<b>Q2</b>	<b>Smt.1</b>	<b>Q3</b>	<b>s.d.Q3</b>	<b>Q4</b>	<b>Y</b>
	1	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	100	100	100	100	100	100
	2	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,1 7	89,1 7
	3	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71,5	71,5
	4	Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	45	45	-	86,5	86,5	86,5

5	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75	75
8	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40	40	60	60	100	100
9	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	100	100	100
10	Indeks pelaksanaan inventarisasi BMN Idle	25	55	55	70	70	100	100
11	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	90	90	87	87	82	82
12	Persentase Produktivitas Lelang	30	45	45	60	60	89	89
13	Persentase deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16	16
14	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15	40	40	75	75	90	90
15	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	85	85	85	85	85	85	85

16	Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100	100	100	100	100	100	100
17	Persentase deviasi Data PNBFP Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
18	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
19	Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82
20	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti	35	40	40	60	60	98	98

#### KONSEKUENSI

1. Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.